

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dalam perkembangannya telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 telah membawa perubahan pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Perubahan penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menjalankan otonominya. Undang-Undang ini juga telah memberi jawaban atas berbagai kritikan tentang pelaksanaan pembangunan yang begitu sentralistik, dimana peran Pemerintah Pusat sangat dominan, sehingga berdampak pada hasil pembangunan yang kurang sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan mematikan inisiatif serta kreativitas daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan pembangunan tentu selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Instansi Pemerintah yang ada di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Instansi ini secara umum bergerak dibidang pelayanan masyarakat tentu selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara tidak langsung dapat

berupa, pengelolaan pendapatan daerah yang nantinya pendapatan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dalam menyusun dan melaksanakan anggaran daerah harus menetapkan kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan tersebut sangat tergantung pada kelancaran pendanaan untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan harus dapat mengelola sumberdaya yang dimilikinya dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sedapat mungkin tidak berhadapan dengan masalah kekurangan atau ketiadaan dana ketika dibutuhkan. Artinya, dana yang dibutuhkan oleh unit kerja semestinya tersedia dalam jumlah yang cukup dan tepat pada waktunya. Untuk itu diperlukan penganggaran kas yang baik guna merencanakan dan mengontrol dana tersebut.

Anggaran kas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Manajemen kas merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh unit perbendaharaan, mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan tentang aliran kas daerah. Agar secara optimal dapat mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Kota Kupang, pengelolaan kas selayaknya dilaksanakan secara terencana, transparan dan akuntabel. Hal ini bermakna bahwa strategi pemerintah daerah untuk memaksimalkan hasil dari uang yang dimilikinya. Pemerintah daerah kemudian membentuk suatu unit kerja yang melaksanakan fungsi perbendaharaan, yang mencakup perencanaan, penerimaan, penatausahaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban kas daerah, yang disebut dengan nama bendahara daerah. Dalam peraturan perundang-undangan terbaru dikenal dengan nama bendahara umum daerah (BUD).

Anggaran kas merupakan rencana keuangan yang mencakup rencana aliran kas masuk, aliran kas keluar, sumber kas, peruntukan penggunaan kas, dan saldo pada akhir periode

anggaran. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, aliran kas masuk yang dianggarkan dapat bersumber dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan, sementara aliran kas keluar dapat berupa pembayaran belanja-belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Anggaran kas berhubungan erat dengan fungsi bendahara, yakni satuan yang bertugas menerima, menyimpan, dan membayarkan uang, maka pelaksana fungsi tersebut bertugas menyusun rencana aliran kas ke depan. Berdasarkan struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah, unit kerja yang menangani perbendaharaan adalah sub-bagian perbendaharaan di bagian keuangan atau bidang perbendaharaan di badan pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun perbendaharaan adalah pihak yang paling mengetahui kondisi kas pada periode berjalan, memiliki catatan historis aliran kas, dan tren aliran kas selama ini, dalam menyusun anggaran kas haruslah melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang merupakan pelaksana pelayanan publik. Dengan demikian, besaran kas masuk dan kas keluar selama satu bulan, triwulan, semester, dan tahun, didasarkan pada kebutuhan satuan kerja. Hal ini tergambar dari pengaturan yang ada di dalam Permendagri 13 Tahun 2006 tentang keharusan satuan kerja melampirkan anggaran kas selama empat triwulan satuan kerja ketika menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Juga dinyatakan bahwa plafon anggaran yang diperoleh tidak boleh dibagi rata ke dalam empat triwulan.

Berdasarkan wawancara pada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan pengelolaan kas yang ada belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan kas yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan yakni, tidak dibuatkannya dokumen anggaran kas dan juga

catatan historis mengenai tagihan-tagihan yang dibuat kurang lengkap. Catatan tersebut misalnya, catatan tagihan pihak ketiga. Selain itu, catatan tentang tren aliran kas tidak dibuat secara baik. Meskipun aturan pemerintah itu sudah ditetapkan tetapi dalam pelaksanaannya belum diterapkan sehingga dapat mengalami kesulitan/ kesalahan dalam melakukan pencatatan pada akhir periode.

Berdasarkan uraian-uraian inilah maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul "Analisis Anggaran Kas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT".

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah Penerapan Anggaran Kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTT sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006?".

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan Anggaran Kas sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTT.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak pemerintah khususnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT untuk mengelola kasnya secara baik dan benar.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lanjutan tentang anggaran kas daerah.